



Komunikasi Kebijakan Dalam Implementasi Program Bus Trans di Kota Padang

Tegar Putra Trimarta¹

¹UIN Imam Bonjol Padang
Email : tegarputra239@gmailcom

ABSTRACT

Policy communication is the process of conveying policy information from policy makers to policy implementers. The purpose of this study is to determine how the implementation of policies made by policy makers and what kind of communication is carried out to realize the policy program. The number of informants was five people, namely the Padang City Transportation Agency, Perumda PSM, and Organda Padang City as well as the community and Angkot drivers who were determined using the criteria that the researcher had determined. The method used in this study was descriptive qualitative, data collection techniques using observation and interviews. The results of the study showed that; the process of conveying policies carried out by policy makers began with the issuance of a Mayoral Regulation then held a meeting with the people involved, namely the Transportation Agency, Organda, and Perumda PSM and socialized it to produce a policy in the form of a form of cooperation that would be carried out with Angkot entrepreneurs. The established policy was conveyed in the form of an invitation to cooperate by exchanging their 3 Angkot units for 1 Trans Bus unit, they received compensation from the exchange, and they were given jobs. Then, the information conveyed by the policy makers was clear by explaining the form of cooperation carried out.

ABSTRAK

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Tujuan penelitian ini Adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan serta komunikasi seperti apa yang dilakukan agar terealisasikannya program kebijakan tersebut. Jumlah informan sebanyak lima orang yaitu Dishub Kota Padang, Perumda PSM, dan Organda Kota Padang serta masyarakat dan Supir Angkot yang ditetapkan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah peneliti tentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, teknik pengambilan data menggunakan pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; proses penyampaian kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan berawal dikeluarkannya Perwako lalu dirapatkan dengan orang yang terlibat yaitu Dishub, Organda, dan Perumda PSM dan mensosialisasikan sehingga menghasilkan sebuah kebijakan berupa bentuk kerjasama yang akan dilakukan kepada para pengusaha angkot. Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut disampaikan berupa ajakan kerjasama dengan menukarkan angkot mereka sebanyak 3 unit menjadi 1 unit Bus Trans, mereka mendapatkan konpensasi dari pertukaran tersebut, dan mereka diberi lapangan pekerjaan. Lalu, informasi yang disampaikan para pembuat kebijakan sudah jelas dengan menjelaskan bentuk kerjasama yang dilakukan.

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Transportasi umum memiliki peranan penting bagi kelancaran aktivitas manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik di kota maupun perdesaan. Dalam menunjang kelancaran aktivitas manusia, pemerintah turut andil dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, dan serta lancar serta efisien baik dari segi pelayan, waktu maupun biaya

Manusia sebagai bagian dari pergerakan roda kehidupan dan makhluk sosial memiliki beragam aktivitas dan kebutuhan akan kelangsungan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, manusia sangat memerlukan sarana transportasi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari dalam melakukan berbagai kegiatan seperti perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan transportasi. Dalam hal ini, pemerintah sangat dituntut dalam menunjang kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi demi kelancaran aktivitas yang dilakukan masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat menggunakan berbagai macam jenis kendaraan. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka kemacetan ialah penggunaan alat transportasi. Alat transportasi merupakan salah satu media utama yang dibutuhkan masyarakat dalam bermobilitas. Dalam melakukan segala jenis aktivitas, media transportasi selalu menjadi pilihan utama. Dalam

pilihan bertransportasi, terdapat dua pilihan transportasi, yaitu transportasi pribadi dengan transportasi umum. Sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Namun bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, memilih menggunakan transportasi umum

Penggunaan transportasi sangat begitu penting dirasakan terutama pada daerah perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi dari masyarakatnya seperti Kota Padang. Kota Padang merupakan pusat dari pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat perkantoran, pendidikan, bisnis, dan perdagangan. Semua orang ingin melakukan sesuatu hal dengan cepat dan mudah. Kemudahan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi sangat penting, sehingga dituntut kemampuan untuk mengoptimalkan biaya dan waktu. Pertumbuhan jumlah penduduk berakibat meningkatnya jumlah pengguna transportasi, sehingga permintaan pelayanan transportasi semakin meningkat. Karena itu, jaringan transportasi di wilayah perkotaan selalu lebih padat dibandingkan dengan wilayah pedesaan.

Dalam menunjang sarana dan prasarana tersebut, tentu ada kebijakan-kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah. Dalam membuat sebuah kebijakan, para pembuat kebijakan dalam membuat dan memutuskan sebuah kebijakan harus melibatkan banyak pihak dalam mengambil sebuah keputusan. Jika dilihat dalam konteks Islam, para pemimpin atau pembuat kebijakan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum

kebijakan tersebut akan dilaksanakan

Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Organisasi dan Manajemen, kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau Lembaga. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dari sebuah kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain meliputi variabel atau faktor *communication*, *resources*, *dispositons*, dan *bureaucratic structure*. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada faktor komunikasi. Didalam teori ini yang terfokus pada faktor komunikasi memiliki beberapa macam dimensi, yaitu dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*)

Dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, mesti disosialisasikan dengan baik agar dalam pengimplemenatian tidak adanya permasalahan yang timbul. Hal tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada multitafsir pada kebijakan yang akan dilaksanakan. Apalagi kebijakan yang akan direalisasikan perlu adanya sebuah model komunikasi agar penyampaian kebijakan dapat dipahami oleh khalayak yang terlibat dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Kota Padang yaitu pengadaan Bus Trans sebagai sarana

transportasi untuk Masyarakat. Kebijakn ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengganti penggunaan transportasi konvensional-tradisiobal seperti angkot, bajaj menjadi transportasi yang berintegritas.

Dalam hal ini, pemerintah menyadari adanya ancaman kemacetan di kota tersebut. Sejak tahun 2014, Pemko Padang menggagas sebuah kebijakan dalam mengendalikan angka kemacetan sekaligus meningkatkan kualitas transportasi umum. Tujuannya untuk dapat menghasilkan sebuah kebijakan di bidang jasa transportasi yaitu peningkatan pada transportasi umum massal yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan transportasi umum yang dikenal dengan Bus Trans Padang yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Walikota Padang nomor 28 tahun 2013 tentang unit pelaksana teknis trans padang. Pada 14 Februari 2014, Pemko Padang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan resmi meluncurkan Bus Trans Padang sebagai transportasi umum massal dengan menggunakan sistem transit massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya sebagai angkutan dalam perkotaan.

Dalam pelaksanaannya, Pemko Padang menargetkan menghadirkan 6 koridor Trans Padang. Saat ini, baru satu yang sudah berjalan di pusat kota ke Lubuk Buaya. Sementara di Jalan Bypass akan segera dibangun dan beroperasi Maret 2020. Rencana 6 koridor termasuk dalam 11 Program Unggulan (Progul) Pemko Padang yang ditarget selesai 2021. Pemerintah Kota Padang bakal membangun 6 koridor Trans Padang. Rencana pembangunan tersebut akan dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang bersama Perusahaan Umum Daerah Padang

Sejahtera Mandiri (Perumda PSM). Enam koridor itu masing-masing, pusat kota - Lubuk Buaya, pusat kota via Bungus Teluk Kabung, pusat kota ke pusat Pemerintahan Kota Padang, Teluk Bayur - Terminal Anak Air, pusat kota - Indarung, dan pusat kota ke Kampus Unand Limau Manis

Konflik-konflik yang muncul dari sebuah kebijakan tentu melibatkan beberapa unsur yang berkaitan dengan pengguna transportasi, pengguna jalan atau para pihak yang memiliki hubungan dengan kebijakan tersebut. Konflik tersebut muncul setelah direalisasikan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan setelah diimplementasikannya kebijakan Bus Trans, masih terdapat beberapa permasalahan dan penolakan yang terjadi. Pada tahun 2019, salah satu penumpang Bus Trans Padang diturunkan dari Bus karena tidak memiliki kartu Brizzi sebagai alat pembayaran. Ia mengungkapkan bahwasannya ia menyayangkan kebijakan pembayaran Trans Padang harus menggunakan kartu Brizzi tersebut dianggap tidak adil. Dalam hal ini, kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dian Fakhri mengatakan, pembayaran dengan kartu Brizzi memang diwajibkan untuk seluruh penumpang. Uang tunai tidak bisa digunakan untuk membayar ongkos Trans Padang. Ia juga menambahkan bahwasannya penggunaan Brizzi sebagai alat pembayaran sudah lama disosialisasikan. Soal kasus yang dialami salah satu penumpang, menurutnya, apa yang dilakukan petugas dengan menurunkan Reno di halte selanjutnya merupakan tindakan tepat. Ia berharap, masyarakat bisa bekerjasama untuk memajukan Trans Padang.

Pada pengoperasian koridor VI rute Limau Manis – Pasar Raya juga terdapat penolakan dari supir angkot. Pada tanggal 16 Februari 2023, puluhan supir angkot menggelar unjuk rasa di Simpang Pasar Baru Unand. Para supir angkot memblokir jalan dan memaksa bus Trans Padang untuk berhenti dan menurunkan para penumpang yang berada dalam bus. Salah seorang supir angkot mengatakan bahwasannya sejak Trans Padang beroperasi dengan rute Unand, pendapatan mereka menurun. Dalam aksi unjuk rasa yang mereka lakukan, setidaknya ada 3 tuntutan yang mereka inginkan, yaitu sesuaikan plang rambu-rambu, mobil trans jangan masuk pasar, dan standarkan harga sewa angkot dengan Trans Padang

Dari permasalahan yang ada, terlihat bahwa masih ada gejolak-gejolak yang timbul ketika ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan transportasi khususnya di Kota Padang. Dari masalah tersebut, masih ada komunikasi yang belum efektif disampaikan para pelaku kebijakan. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu adanya komunikasi yang lebih aktif untuk menyampaikan isi kebijakan. Komunikasi perlu digiatkan antara pembuat kebijakan dengan sasaran kebijakan, komunikasi antara para sasaran kebijakan, juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam kebijakan itu sendiri. Dalam upaya menganalisis kebijakan itu sendiri, komunikasi merupakan mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horizontal, dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal, yakni dari satu generasi kepada generasi berikutnya

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana komunikasi kebijakan publik yang dilakukan pembuat kebijakan (policy maker) dalam

Tegar – Komunikasi Kebijakan Dalam Implementasi Program Bus Trans di Kota Padang
mengimplementasi program Bus Trans di Kota Padang permasalahan yang terjadi.

RESEARCH METHODS / METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami realitas tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah serta dengan manfaat berbagai metode alamiah

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, serta analisis data bersifat induktif. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan penelitian kualitatif yaitu langkah penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan orang-orang terhadap perilaku data yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan angka, atau statistika dalam pengumpulan data dalam memberikan penafsiran terhadap hasil yang didapatkan. Informan dalam penelitian ini adalah (1) Dishub Kota Padang (2) Perumda PSM (3) DPD Organda Kota Padang (4) Supir Angkot

Penelitian kualitatif lebih fokus terhadap kegiatan yang sifatnya mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengetahui kejadian atau peristiwa secara lebih mendalam. Tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk memudahkan peneliti untuk menggambarkan secara jelas mengenai

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi terkait permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi program Bus Trans Padang melalui media sosial seperti Instagram dan platform berita. Teknik analisis data menggunakan reduksi data yaitu pemilihan dan penyederhanaan informasi data penelitian, penyajian data yaitu mengorganisir data penelitian dan menarik kesimpulan.

RESULT AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang terjadi terkait program Bus Trans ini mencakup cara pembayaran yang dari Tunai berubah Non Tunai, karena banyak dari pengguna Bus Trans yang masih awam dan tidak mengetahui perubahan kebijakan tersebut. Pada pelucuran Koridor IV juga terdapat permasalahan yang membuat para supir angkot melakukan aksi demo. mereka menuntut agar rute pemberhentian dirubah, Bus Trans tidak boleh masuk pasar, dan tarif ongkos jangan murah.

Dalam hal komunikasi, Cook dan Hunsaker (Cook & Hunsaker, 2007), menyatakan bahwa komunikasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi, dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian, komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, komunikasi menurut Agustino (Agustino, 2009) merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Implementasi akan berjalan efektif, jika para pembuat kebijakan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Abdul Wahab (Wahab, 2005) mengatakan bahwa pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi

di dalam tubuh pemerintahan sehingga dapat diterjemahkan sebagai penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan sebuah kebijakan negara

Permasalahan tersebut tidak lepas dari gejala yang timbul ketika ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan transportasi khususnya di Kota Padang. Dari masalah tersebut, masih ada komunikasi yang belum efektif disampaikan para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, pengkajian lebih lanjut mengenai komunikasi yang dilakukan oleh stakeholders dalam kebijakan transportasi bus trans di Kota Padang.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, Menurut Edward III dalam Widodo meliputi dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien

3. Konsistensi merupakan prinsip penting dan teratur yang ada dalam proses kognitif dan perubahan sikap terjadi sebagai akibat adanya informasi yang mengganggu keteraturan ini. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, keempat informan seperti Dishub menyatakan bahwa program Bus Trans Padang ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang berdasarkan Perwako yang dikeluarkan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Bus Trans, Dishub juga ikut melibatkan Perumda PSM sebagai pengelola, Organda Padang sebagai Organisasi yang bergerak di bidang Angkutan, dan Perusahaan yang memiliki angkutan (Angkot). Program Bus Trans ini memiliki tujuan untuk melanjutkan penataan angkutan umum dengan pembukaan koridor baru Trans Padang serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar pergerakan orang dan barang.

Dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan Bus Trans, para pembuat kebijakan mensosialisasikan kepada sasaran kebijakan yaitu para pengusaha angkot. Pesan yang disampaikan berupa ajakan kerjasama dengan menukarkan angkot mereka sebanyak 3 angkot menjadi 1 Bus Trans, menjelaskan terkait trayek, rute, dan harga serta mendapatkan lapangan pekerjaan dan konspensasi karena angkot mereka dimatikan. Media yang digunakan dalam menyampaikan informasi kebijakan berupa Facebook, Instagram, Tiktok, WA Group serta secara langsung melalui rapat.

Namun, dalam penyampaian informasi kebijakan terdapat gangguan yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya terdapat gangguan berupa demo yang dilakukan oleh para pemilik angkot yang keberatan dengan hadirnya program Bus Trans Padang. Dari hasil temuan, pihak angkot yang melakukan demo bukan termasuk ke dalam para pemilik angkot yang tergabung dalam sebuah PT yang bekerja sama dengan Dishub.

Dalam temuan tentang dimensi transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan Bus Trans, peneliti menemukan bahwa dimensi transmisi yang dilakukan para pembuat kebijakan sesuai dengan dimensi yang peneliti jabarkan di Bab II. Yang mana dalam dimensi transmisi tersebut, para pembuat kebijakan dalam menyampaikan informasi kebijakan tidak hanya ditujukan kepada pelaksana kebijakan (*Implementors*) kebijakan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pembuat kebijakan juga harus paham, mengerti serta siap dalam menjalankan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dalam penyampaian kebijakan, komunikasi yang dilakukan harus jelas dan dimengerti para pelaksana, yang menyangkut kejelasan petunjuk pelaksanaan maupun kejelasan pesan komunikasi. Kejelasan pesan menjadi penting tatkala kita mengkomunikasikan sesuatu sebab pesan inilah yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi

Dimensi kejelasan komunikasi dalam

implementasi kebijakan Bus Trans, peneliti menemukan bahwa dimensi kejelasan yang dilakukan para pembuat kebijakan berlandaskan kepada Perwako Nomor 21 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Pemko Padang. Disamping itu, para pebuat kebijakan juga harus memahami tugas dan wewenang dalam menjalankan sebuah kebijakan. Hal ini penting agar kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Perumda PSM ditunjuk oleh Pemerintah Kota Padang sebagai pihak pengelola Trans Padang berdasarkan peraturan Perwako Nomor 9 tahun 2021 tentang penugasan pengelolaan Trans Padang kepada Perumda PSM. Seterusnya Organda memiliki wewenang untuk mengajak para pengusaha angkot untuk bekerja sama dalam merealisasikan program yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam memastikan akuratnya sebuah informasi kebijakan disampaikan, tentu dilihat dari bagaimana proses yang terjadi di lapangan. Para pembuat kebijakan harus bisa memastikan apakah informasi kebijakan tersebut tersampaikan atau malah sebaliknya. Itu terlihat dari beberapa koridor yang telah terealisasikan seperti koridor I rute Lubuk Buaya – Pasar Raya, Koridor IV rute Teluk Bayur – Anak Air, Koridor V rute Indarung – Pasar Raya, dan Koridor VI rute Limau Manis (Unand) – Pasar Raya. Untuk koridor II dan III masih dalam proses merealisasikan yang ditargetkan beroperasi setelah dilucurkannya koridor VI rute Limau Manis – Pasar Raya.

Dalam proses mentransmisikan kebijakan tersebut, para pembuat kebijakan menyampaikan secara jelas kepada pelaksana, target sasaran, dan pihak lain yang berkepentingan terkait maksud, tujuan, dan substansi dari kebijakan yang akan diimplementasikan

Dari hasil temuan peneliti bahwa Dishub bertanggung jawab penuh atas kebijakan Bus Trans Padang ini dan juga bertindak sebagai pelaksana yang mensosialisasikan kepada target/sasaran dari kebijakan tersebut dan bekerja sama dengan Organda Padang sebagai organisasi yang bergerak dibidang angkutan umum. Dishub dan Organda memiliki wewenang dalam mensosialisasikan kebijakan Bus Trans Padang dikarenakan dishub mendapat mandat sebagai penanggungjawab dan Organda sebagai organisasi angkutan umum. Disamping itu, dalam pengelolaan Tran Padang, Perumda PSM ditunjuk sebagai pengelola Trans Padang berdasarkan Perwako Nomor 104 tahun 2020

Salah satu hal yang penting dalam komunikasi dan kebijakan adalah Konsistensi. Dalam dimensi konsistensi sangat diperlukan oleh pembuat kebijakan agar informasi kebijakan yang disampaikan kepada pihak yang menjadi target/sasaran kebijakan tidak mengalami simpang siur dalam menerima informasi kebijakan. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan yang nantinya dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Dalam penyampaian sebuah kebijakan, informasi yang disampaikan kepada sasaran kebijakan tentu haruslah konsisten, ini menyangkut kepastian dan kejelasan perintah yang harus dipenuhi oleh para pelaksana kebijakan. Dengan kata lain perintah yang diterima tidak boleh saling bertentangan agar tidak membingungkan pelaksana (perintah yang dikirimkan tidak boleh berubah).

Dari hasil temuan yang peneliti

lakukan, para pembuat kebijakan konsisten dalam menjalankan kebijakan sesuai Perwako yang dikeluarkan Pemko Padang. Hal ini terlihat dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Firdaus Bakhtiar sebagai Kasi Manajemen Angkutan yang menuturkan bahwa Dishub hanya menjalankan Perwako yang dikeluarkan Pemko Padang dan membuat aturan dalam menjalankan program Bus Trans tersebut dan sama halnya dengan Organda Padang yang bertugas dalam mensosialisasikan kepada para pemilik angkot serta Perumda PSM bertanggung jawab sebagai pengelola Trans Padang dibawah arahan Dishub Padang. Selain itu, jika ada kebijakan terbaru yang memungkinkan perubahan yang terjadi, akan ada penyampaian yang disampaikan baik melalui rapat dan melalui media sosial.

Dalam proses pengimplementasian kebijakan Trans Padang tidak terdapat perubahan kebijakan yang terjadi. Dishub, Organda, dan Perumda PSM masih menjalankan aturan yang ada seperti proses kerjasama dengan pengusaha angkot dengan menukarkan 3 angkot menjadi 1 Bus Trans

CONCLUSION / KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian dan wawancara mengenai bagaimana komunikasi yang dilakukan para pembuat kebijakan dalam pengimplementasian program Bus Trans Padang dengan menggunakan teori Edward III yaitu Komunikasi dengan variabelnya Dimensi Transmisi, Dimensi Kejelasan, dan Dimensi Konsistensi.

Pada aspek transmisi terlihat bahwa proses penyampaian kebijakan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan berlangsung dari awal dikeluarkannya

Perwako oleh Pemko Padang, lalu pengambil kebijakan merapatkannya dengan orang yang terlibat dalam program Trans Padang yaitu Dishub, Organda, dan Perumda PSM dan mensosialisasikannya sehingga menghasilkan sebuah kebijakan berupa bentuk kerjasama yang akan dilakukan kepada para pengusaha angkot. Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut disampaikan kepada sasaran kebijakan yaitu supir angkot berupa ajakan kerjasama dengan menukarkan angkot mereka sebanyak 3 unit menjadi 1 unit Bus Trans, mereka mendapatkan kompensasi dari pertukaran tersebut, dan mereka diberi lapangan pekerjaan. Namun, gangguan yang terjadi yaitu terdapat penolakan yang dilakukan oleh supir angkot yang melakukan demo/unjuk rasa dengan kehadiran kebijakan Bus Trans Padang.

Pada aspek dimensi kejelasan dalam proses pengambilan kebijakan menurut pemerintah dan organda relatif baik dan sudah jelas namun sebaliknya dari beberapa pengusaha angkot belum ada kejelasan sehingga muncul gejala yang terjadi dilapangan seperti penolakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam dimensi kejelasan masih belum terlihat penilaian kejelasan dari masing-masing unsur yang terlibat dalam kebijakan Trans Padang. Pada aspek konsistensi terlihat bahwa para pengambil kebijakan tetap konsistensi melakukan aktivitasnya sesuai dengan Perwako nomor 21 tahun 2013. Lalu informasi yang berkaitan dengan kebijakan Trans Padang juga konsisten berdasarkan alur aturan perundang-undangan yang ada.

REFERENCES / DAFTAR PUSTAKA

- Widodo, Joko. 2018, *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- Hasibuan, Malayu. 2004. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pres
- Cook, C. W., & Hunsaker, P. 2007. *Management and Organizational Behaviour*. McGraw-Hill Education
- Agustino, L. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar
- Tohirin. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada,.
- Wahab, A. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Akib, H. 2012. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
<https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
3328. Perwako 28 T.2013UPT Trans Padang.pdf
- <https://langgam.id/6-koridor-trans-padang-segera-dibangun-ini-rutenya/>